

**RANGANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA  
(RENJA)  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**





**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
  23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
  24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
  25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

## KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang terukur dengan target output yang jelas untuk dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi, dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Sesuai dengan Rencana Kerja 3 Tahunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut yang merupakan hasil perumusan yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini serta proyeksi 3 (tiga) tahun mendatang (2024 – 2026), yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang Pertanian.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini disusun dalam bentuk dokumen yang harus dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan, akhirnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat disusun, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Pedoman Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun kedepan yang harus dipedomani.

Pelaihari, Juni 2025  
KEPALA DINAS,  


**Ir. M. FARIED WIDYATMOKO**  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19680929 199503 1 006

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	18
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	20
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....	29
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	32
4.1 Program dan Kegiatan .....	32
Bab V Penutup .....	51

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja 2025 mengacu peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perturan daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Atas dasar peraturan tersebut Rancangan Renja disusun untuk memberikan gambaran rencana kerja SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Dinas teknis yang berorientasi pada pelayanan publik selaras dan sejalan dalam pencapaian rencana strategis lima tahun kedepan dalam mewujudkan pencapaian target Visi dan Misi RPJMD tahun 2024 s/d 2026. Dalam mewujudkan pencapaian target Misi tersebut tentang didukung dengan kesiapan anggaran pembiayaan belanja dalam memenuhi target-target dari rencana kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Tanah Laut. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Tanah Laut No. 114 Tahun 2021 (tanggal 14 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas seorang Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang (Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan dan Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian) dan 3 Kasubag (Kasubag Perencanaan, Kasubag Umum Kepegawaian dan Kasubag Keuangan) (Struktur Organisasi terlampir).

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana otonomi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, hortikultura dan perkebunan yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, kewenangan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas:

1. Perumusan kebijakan teknis, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas.
5. Pembinaan UPT Dinas.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan memberlakukan Rencana Strategi (Renstra) periode Tahun 2024 – 2026 yang merupakan rencana strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, yang merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Aspek inilah yang selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Pertanian Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 - 2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2025 perlu untuk dipedomani tentang tata cara tahapan penyusunan Renja Sesuai kaidah dan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta dasar hukum yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  5. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
  9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
12. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 000.7.3/404/Perenc.Makro/2024 tentang Permintaan Dokumen Renja SKPD Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD tahun 2025 SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut adalah merupakan arah dan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dan selaras dengan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka mewujudkan konsep rencana kerja yang terukur, terarah dan akuntabel dalam pencapaian Misi RPJMD Tahun 2024 s/d 2026.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD tahun 2025 SKPD adalah sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dengan berupaya untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur berupa output dan outcome serta dampak bagi kelangsungan dan kepentingan publik atau masyarakat maupun pelayanan institusi SKPD tersebut dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditentukan

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan Rancangan Awal Renja SKPD tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan dinas, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I   Pendahuluan;
- Bab II  Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V  Penutup
- Lampiran (jika ada)

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 202 terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan pagu anggaran adalah sebesar 61.108.137.157,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.615.224.851,-, atau sebesar 90,01%, pada kinerja SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, hal ini dapat terlihat dari laporan kinerja keuangan dari beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh SKPD dapat terlaksana dengan baik. Pencapaian target kinerja output dan outcome dapat terpenuhi sesuai target dan sasaran yang telah ditentukan.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja yang baik tentu harus ditunjang dengan sumber pendanaan yang cukup dan memadai sehingga harapan yang ingin dicapai dari rencana kerja tersebut dapat terpenuhi dari capaian target dan sasaran selama pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak bersentuhan dengan keadaan permasalahan dan gangguan lainnya diluar eksternal lingkup SKPD tersebut.

Adapun dampak dari pelaksanaan kegiatan tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada saat proses perjalanannya ternyata kemampuan likwiditas APBD daerah telah mengalami perubahan dalam skenario anggaran, hal ini tentu akan berdampak kepada sumber pembiayaan SKPD yang telah dibuat berupa DPA tersebut. Disisi lain pelaksanaan tentu adanya pengurangan pagu terhadap kegiatan yang sangat urgen untuk dilaksanakan.

Hasil evaluasi sebagai wujud dari pelaksanaan rencana kerja dalam mewujudkan program dan kegiatan tahun lalu terkait dengan capaian Rencana Strategis tahun untuk tahun 2024 ternyata capaian kinerja terhadap realisasi indikator kinerja dalam rangka meningkatkan produksi pertanian sesuai hasil indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Dalam proses perjalanannya pencapaian realisasi indikator kinerja program dan kegiatan tahun anggaran 2024 untuk masing-masing produksi atas target yang ditetapkan ternyata hasil produksi dalam rangka peningkatan produksi semua mencapai target dengan kata lain 6 komoditas yang menjadi target kenaikan produksi dari rencana target tahun 2024 dibanding tahun 2023 untuk komoditas padi, jagung, cabe, bawang merah, sawit dan karet semua mengalami kenaikan produksi.

Untuk mengetahui .evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat pada table evaluasi tujuan, sasaran program tahun 2024 dan tabel evaluasi tujuan, sasaran, program tahun 2024 dan Tabel TC. 29 sebagai berikut :

**Tabel Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan produktivitas komoditas unggul pertanian	meningkatnya produksi komoditas unggulan pertanian	Pengembangan Pertanian dalam rangka meningkatkan produksi unggulan pertanian	Produksi Pertanian					
			Padi	Ton	144.300	169.270	117,30%	-
			Jagung	Ton	123.136	123.739	100,49%	-
			Bawang Merah	Ton	11,23	120	1.068,57%	-
			Cabe	Ton	2.370,10	2.857	120,54%	-
			Karet	Ton	15.182,30	21.354	140,65%	
			Sawit	Ton	52.920,21	75.235	142,17%	

**Tabel T-C29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**  
**Kabupaten Tanah Laut**  
**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8	9 = (6+7+8)	10 = (9/4)
3.27.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	IKM	90 Nilai	90 Nilai	83,75 Nilai	93,05 Nilai	90 Nilai	88,93 Nilai	93,61
3.27.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	% Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100

3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7	7	7	100	7	7	100
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5	5	5	100	5	5	100
<b>01 . 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	% Capaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/bulan	148	12	12	84,47%	148	12	0
01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen	5	5	5	99,99%	5	5	1
<b>01 . 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	% Capaian administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	1	86,77%	1	0	0
01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	1	86,98%	1	0	0
01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1	-	-	-	1	-	-

01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	2	2	75,79%	2	2	1
01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	1	1	48,61%	1	1	1
01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	24	99,97%	24	24	0
<b>01 . 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	% Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	-	-	-	
01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	12	67,89%	12	12	1

01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	12	97,94%	12	12	1
<b>01 . 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	% Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	1	99,71%	1	1	1
01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	13	13	70,25%	3	13	4
01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22	22	22	97,71%	22	22	1

02	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	% Pemenuhan Sarana Pertanian	100	100	100	100	100	100	100
02 . 2.01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	% Capaian Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100	100	100	100	100	100	100
02 . 2.01 . 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	1	1	90,54%	4	1	0
02 . 2.01 . 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3	1	1	97,98%	4	1	1
02 . 2.02	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	% Capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100

02.2.02.01	Penjamin Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Penjamin Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	1	1	1	96,91%	1	1	0
03	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	% Pemenuhan Prasarana Pertanian	100	100	100	100	100	100	100
03.2.01	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	% Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian	100	100	100	100	100	100	100
03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	Jumlah dokumen	1	1	1	95,70%	1	1	-
03.2.02	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	% Capaian Pembangunan Prasarana Pertanian	100	100	100	100	100	100	100
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani (JUT)	42	42	42	96,16%	42	42	2
05	<b>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	% Pemenuhan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	100	100	100	100	100	100

05.2.01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	% Capaian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Lahan Pengendalian OPT (Herktar)	30	30	29	81,54%	30	29	1
06	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	% Pemenuhan perizinan usaha pertanian	100	100	100	100	100	100	100
06.2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	% Capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100
06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah dokumen	1	1	1	74,93%	1	1	-
07	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	% Penyuluh yang terlatih	100	100	100	100	100	100	100

07.2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	% capaian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100	100	100	100	100	100	100
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah unit	1	1	1	89,99%	1	1	1

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kabupaten Tanah Laut sesuai kebijakan teknis dan fungsi lainnya dalam mengemban amanat pekerjaan yang harus dilaksanakan secara konsisten untuk pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pertanian kedepan sesuai target Rencana Strategis yang dilaksanakan pada tahun 2024 s/d 2026 yaitu peningkatan produksi pertanian, sehingga dalam rangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah sebagai wujud implementasi pelaksanaan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2026.

Pencapaian target kinerja yang dilaksanakan tidak terlepas dari pencapaian rencana startegis dalam mendukung pencapaian pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, yang merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan dan sejalan program nasional yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur standar pelayanan maksimal dalam mewujudkan swasembada pangan khususnya di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu tersebut

.Terkait dengan tabel tersebut dibawah sehubungan dengan adanya standar pelayanan minimal terkait dengan keberadaan tugas dan fungsi dinas Tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Kabupaten Tanah Laut belum mengampu kegiatan pemerintah pusat yang punya standar pelayanan tersebut. Sehingga hal ini sesuai dengan isi tabel TC. 30 masih (0) karena tidak adanya standar pelayanan minimal yang belum melaksanakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Dalam pengukuran tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang diuji, maka pengukuran dapat dilakukan melalui membandingkan produksi yang dihasilkan pada tahun penilaian/tahun (n) dibandingkan dengan produksi pertanian 2 tahun sebelumnya, untuk mengetahui tingkat kenaikan/penurunan produksi, hal ini sesuai dengan Tupoksi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yaitu meningkatkan produksi pertanian (padi, jagung, cabe, bawang merah, kelapa sawit dan karet).

Perbandingan produksi pertanian Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2022 s/d 2024 terjadi kenaikan, hal ini disebabkan karena adanya berbagai program dan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi pertanian, diantaranya Program Optimalisasi Lahan Rawa (Opla) seluas 16.541 ha, dan adanya Program Tala Bungas (Tanah Laut Lumbung Beras), yaitu berupa kegiatan dalam upaya peningkatan produksi padi/beras dengan cara Ekstensifikasi (peningkatan indeks pertanaman) dan Intensifikasi (penggunaan benih unggul dan benih lokal umur pendek), program ini diperkuat dengan Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Produksi Padi, sebab yang ketiga adanya Program Gernas (Gerakan Nasional) percepatan tanam, yaitu gerakan untuk mengatur jadwal tanam yang menyesuaikan dengan keadaan iklim/cuaca, sehingga tanaman padi bisa terpenuhi kebutuhan air nya dan tidak mengalami kekeringan ataupun bisa bertahan apabila terjadi banjir, dan adanya bantuan sarana produksi dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi.

Pada tanaman Jagung, kenaikan produksi pada tahun 2024 dilakukan dengan cara intensifikasi, karena banyaknya alih fungsi lahan tanaman jagung ke sawit, cara intensifikasi yaitu perubahan penggunaan benih oleh para petani jagung, dari yang sebelumnya petani menggunakan benih non unggul/lokal sekarang beralih menggunakan benih hibrida/unggul yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi, dengan rata-rata produktivitas 7,7 ton/ha, dan adanya bantuan sarana produksi dari kementerian pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan berupa benih, pupuk dan pestisida.

Peningkatan produksi cabe di tahun 2024 sebesar 70,67 ton, dikarenakan adanya program peningkatan produksi cabe yang salah satu tujuannya untuk pengendalian Inflasi, yang berasal dari dana APBN, APBD I dan APBD II, yang kegiatannya berupa bantuan bibit cabe sebanyak 1.800 bibit cabe dari kegiatan Turdes Insting (Turun ke Desa Menekan Inflasi dan Stanting), kegiatan Insentif Fiskal bantuan bibit cabe sebanyak 36 ha untuk 18 kelompok tani, dan bantuan bibit cabe besar untuk 10 kelompok tani sebanyak 10 ha, dan pada tahun 2024 harga jual cabe cukup bagus sehingga menarik minat para petani untuk menanam cabe.

Tanaman bawang merah juga mengalami kenaikan produksi yang disebabkan adanya bantuan pengembangan bawang merah seluas 13 ha dari Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan untuk 13 kelompok tani dan bantuan bibit bawang merah dari kegiatan Insentif Fiskal sebanyak 2 ha untuk 4 kelompok tani,

dan peningkatan produksi bawang merah juga disebabkan adanya Program Tala Sumringah (Tanah Laut Sentra Bawang Merah), berupa kegiatan untuk meningkatkan produksi bawang merah dengan cara Ekstensifikasi (penambahan luas area tanam melalui pola Kemitraan (Grosir) dengan luas areal minimal 1 ha dan Pola Swadaya Pemberdayaan Petani (eceran) dengan luas area kecil/0,25 ha, kenaikan produksi bawang merah juga disebabkan adanya bantuan sarana produksi dari Kementerian Pertanian berupa sarana produksi.

Kenaikan produksi pada tanaman karet sebesar 1.654,10 ton dibanding tahun 2023 terjadi karena peningkatan luas tanam karet sebanyak 253 ha pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Produksi tanaman sawit yang meningkat pada tahun 2024 sebesar 2.005,30 ton, yang disebabkan adanya penambahan luas area produksi pada Tanaman Menghasilkan (TM) sawit sebanyak 325 ha pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, adanya bantuan pupuk dari anggaran APBD II, dan harga jual sawit pada tahun 2024 cukup bagus sehingga menarik petani untuk menanam sawit, sehingga yang berdampak pada peningkatan produksi sawit di tahun 2024.

Data Produksi Komoditas Pertanian Kab.  
Tanah Laut Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Komoditas	Realisasi Produksi (ton)			Kenaikan Produksi (ton)		Penurunan Produksi (ton)	
		2022	2023	2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
1	Padi	143.962	147.410	169.270	3.448,06	21.859,94	-	-
2	Jagung	122.835	123.060	123.739	225	679	-	-
3	Cabe	2.350,9	2.786,33	2.857,00	435,43	70,67	-	-
4	Bawang Merah	11,0	111,48	120	100,48	8,52	-	-
5	Karet	14.601,7	19.699,9	21.354	5.098,20	1.654,10	-	-
6	Kelapa Sawit	50.865,7	73.229,7	75.235	22.344	2.005,30	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>334.626,3</b>	<b>363.511,08</b>	<b>392.575,00</b>	<b>31.651,17</b>	<b>26.277,53</b>	-	-

Sumber Data : Distanhorbun Tanah Laut 2024.

**Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut**

No	Uraian Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pada tahun 2024 tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut terhadap tingkat koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi ataupun dengan Kementerian Pertanian berjalan cukup baik, hal ini dapat dibuktikan kesiapan Pemerintah Provinsi pada tingkat koordinasi dan fungsi pelayanan untuk selalu mendukung program dan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tingkat kebutuhan daerah dalam pencapaian swasembada pangan dalam rangka meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian di Kabupaten Tanah Laut. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi selalu berupaya untuk memperjuangkan setiap usulan program dan kegiatan dengan beban belanja APBD provinsi maupun APBN untuk selalu dikawal mengingat Kabupaten Tanah Laut sangat potensi dan daerah strategi dalam pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Sedangkan tingkat koordinasi dengan kelembagaan kementerian terkait sangat mendukung dalam hal pengembangan pertanian di Kabupaten Tanah Laut sebagai wujud pelaksanaan kepedulian Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian telah berupaya memberikan bantuan sarana dan prasarana, bibit, pupuk berupa alat-alat lainnya yang dibutuhkan bagi kelangsungan pengembangan pertanian di Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian target kinerja berupa terwujudnya swasembada pangan.

Namun pelaksanaan dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dari target nasional yang diharapkan oleh Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tersebut, tidak terlepas konsistensi kesiapan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut terutama dalam hal kesiapan lahan yang tersedia dengan kawasan hamparan yang memenuhi standar target nasional yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah, data-data sekunder yang diperlukan terkait dengan keberadaan kelompok tani yang didukung dengan keberadaan lahan yang terpetakan secara jelas dan benar-benar ter up date keberadaannya serta didukung ketersediaan calon penerima calon lahan (CPCL) yang sudah terdaftar dalam aplikasi SIMLUHTAN

Dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut di sektor pertanian khususnya yang menjadi tantangan sekarang berupa

kesediaan lahan yang harus tersedia karena mengingat komitmen target nasional cukup besar terhadap pencapaian produktivitas sektor pertanian, namun upaya ini tidak ditunjang dengan pembiayaan yang memadai. Pada hal pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tanah Laut sangat potensial untuk didukung sepenuhnya mengingat pengembangan strategis kawasan sudah dipetakan kedalam 3 koridor pengembangan kawasan sesuai dengan tingkat kebutuhan lahan yang diperlukan. Dan hal yang tidak kalah pentingnya Kabupaten Tanah Laut sekarang ini mempunyai 2 (dua) perusahaan besar milik swasta berupa pengolahan pakan ternak yang tidak ada di Kabupaten lainnya khususnya di Kalimantan Selatan dalam upaya menampung kebutuhan bahan mentah hasil pertanian berupa jagung khususnya, juga terdapat 7 (tujuh) pabrik CPO (Crude Palm Oil).

Untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut, tidak terlepas pula ketersediaan dana yang memadai pula, pemerintah daerah sekarang ini mengalami gejala keberadaan anggaran, sehingga pembiayaan yang diusulkan untuk mengakomodir kegiatan tahun 2025 lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut. Untuk mensinyalir hal tersebut diatas konsekwensi sekarang dalam upaya meraih keberadaan dana pusat melalui, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan perlu untuk diperjuangkan dengan syarat mempersiapkan segala kebutuhan riil dan rekomendasi usulan yang diperlukan

Dalam rangka mendukung isu strategis sesuai tugas dan fungsi pelayanan dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, maka perlu dipetakan terkait dengan pelaksanaan rencana strategis untuk tahun 2024 s/d 2026 yang akan di laksanakan berupa :

1. Terbatasnya infrastruktur lahan dan air seperti jaringan irigasi, bangunan air dan jalan usaha tani/jalan produksi
2. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit
3. Terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi
4. Masih rendahnya penggunaan pupuk organik
5. Terbatasnya alat mesin pertanian
6. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan
7. Minat pemuda terhadap pertanian masih rendah
8. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian

## **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat tentu tidak terlepas dari pelaksanaan Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan berdasarkan hasil dan kesempatan dan batasan yang diusulkan sesuai dengan tingkat kebutuhan skala prioritas dari hasil aspirasi kelompok kerja DPRD Kabupaten Tanah Laut yang diperlukan dalam rangka mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Tanah Laut untuk menuju swasembada pangan

Namun sejalan dengan pelaksanaan tersebut diatas tentu akan ditunjang oleh ketersediaan anggaran yang memadai dan komitmen Pemerintah Daerah, dalam upaya memajukan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tanah Laut.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk mengakomodir memberikan bantuan berupa hibah berupa sarana dan prasarana alat mesin pertanian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang memadai melalui anggaran daerah Kabupaten Tanah Laut diluar dari pelaksanaan kegiatan belanja langsung.

Disamping itu pula usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat para petani khususnya lebih banyak kepada pembangunan infrastruktur pertanian berupa jalan usaha tani, jalan produksi, benih/bibit, alsintan dan lain-lain. Namun proses usulan masyarakat para petani tersebut tidak semua dapat terakomodir, hal ini akan sangat tergantung dengan kondisi kesediaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tanah Laut dan penentuan skala prioritas yang menjadi tolak ukur berdasarkan tingkat kebutuhan hasil musrenbang tingkat kecamatan sampai dengan pelaksanaan musrenbang kabupaten. Untuk mengetahui penelaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepetingan tahun 2024 dapat dilihat pada table TC. 32 dibawah ini

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1		3	4	5	6	7	8
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				<b>60.573.136.563,-</b>		
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>IKM Sekretariat Dintanhorbun</b>	90	<b>26.031.964.210,-</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>15.094.112</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah dokumen	7 dokumen	7.998.360	swakelola	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah Laporan	4 laporan	7.095.751,59	swakelola	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>22.404.680.186</b>		

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	Tanah laut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 orang/bulan	22.396.681.826	swakelola	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tanah laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42 dokumen	7.998.360	swakelola	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>		
	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 orang	0	swakelola	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah laut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	50.000.000	swakelola	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>760.819.272</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.995.968	swakelola	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah laut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Paket	276.579.190	swakelola	

			Disediakan				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanah laut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	19.997.813	swakelola	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah laut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.851.667	swakelola	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanah laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.960.000	swakelola	
	Penyediaan Bahan / Material	Tanah laut	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	17.999.634	swakelola	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	380.435.000	swakelola	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>508.004.499</b>		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	384.060.000	swakelola	

	Pengadaan Mebel	Tanah laut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 unit	113.954.499	swakelola	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Laut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.990.000	swakelola	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	swakelola	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.655.659.652</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanah laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.650.000	swakelola	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	286.000.000	swakelola	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.368.009.652	swakelola	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>637.706.490,03</b>		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanah laut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	31.000.000	swakelola	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	98 unit	378.000.000	swakelola	
	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Tanah laut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	39.860.000	swakelola	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	188.846.490,03	swakelola	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	swakelola	
2	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		<b>Persentase Pemenuhan sarana pertanian</b>	<b>20%</b>	<b>7.766.363.011,94</b>		
	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Tanah Laut</b>	<b>Persentase capaian pengawasan penggunaan sarana</b>	<b>100%</b>	<b>7.569.968.114,26</b>		

			<b>pertanian</b>				
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tanah laut	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	632.641.551,76	swakelola	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Tanah laut	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	6.937.326.562,50	swakelola	
	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Tanah laut</b>	<b>Persentase capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>196.394.897,68</b>		
	Penjamin Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Tanah laut	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 VUB (Varietas Unggul Baru)	78.615.794,00		
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Tanah laut	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	117.779.103,68		

3	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		<b>Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan dan Hortikultura Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman perkebunan Persentase pemenuhan prasarana pertanian</b>	<b>35 % 10 % 40 %</b>	<b>21.812.822.640,41</b>		
	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Tanah laut</b>	<b>Persentase capaian Pengembangan prasarana pertanian</b>	<b>100%</b>	2.070.199.569,00		
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Tanah laut	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	2 dokumen	2.057.289.569,00	swakelola	
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tanah laut	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 dokumen	12.910.000,00	PL	

	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Tanah laut</b>	<b>Persentase capaian pembangunan prasarana pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>19.742.623.071,41</b>		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tanah laut	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 unit	635.133.776,00	PL	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Tanah laut	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	1.051.365.324,60	PL	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tanah laut	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	98 unit	18.056.123.970,81	PL	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		<b>Persentase Luas Area Terdampak OPT dan DPI Yang Tertangani Pada Tanaman Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>848.372.553,54</b>		
	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Tanah laut</b>	<b>Persentase capaian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>848.372.553,54</b>		

	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tanah laut	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	60 Ha	470.498.756,54	swakelola	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tanah laut	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1.000 Ha	377.873.797,00	swakelola	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		<b>Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan</b>	<b>100%</b>	<b>2.851.608.949,30</b>		
	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tanah laut</b>	<b>Persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>2.851.608.949,30</b>		
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Tanah laut	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 dokumen	<b>2.851.608.949,30</b>	swakelola	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		<b>Luas Perkebunan Sawit Rakyat yang</b>	<b>2000 ha 16,2 %</b>	<b>1.262.005.197,00</b>		

			<b>Terdaftar Persentase Penyuluh Pertanian Yang Terlatih</b>				
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Tanah laut</b>	<b>Persentase Capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>1.262.005.197,00</b>		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Tanah laut	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 unit	962.005.197,00	swakelola	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tanah laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 unit	0	swakelola	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tanah laut	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	300.000.000	swakelola	

## **BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman membuat program tentang Swasembada Pangan Pokok khususnya padi/beras, yang akan dicapai melalui pengembangan pertanian dengan program-program nasional, termasuk program peningkatan produksi padi yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang akan di laksanakan pada tahun 2024 s/d 2025 (Musim Tanam 2024/2025), seiring dengan adanya kepercayaan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka pengembangan pertanian, peningkatan produksi melalui Indek Pertanaan yang dapat dilakukan tiga sampai empat kali tanam untuk benih unggul padi yang berkualitas dan luas tanam berupa kebijakan program Nasional pada Tanaman Pangan antara lain Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 400 seluas 1000 Hakter, Pengembangan jagung berbasis terpadu yang terintegrasi, Optimalisasi Lahan Rawa, Optimalisasi lahan kering. Pada bidang perkebunan antara lain Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Perluasan Areal Tanam Baru (PATB), Pengembangan Kopi, Pengembangan kebun rakyat melalui bantuan pembeku latek, Untuk bidang Hortikultura arah kebijakan nasional berupa pengembangan bawang merah, pengembangan aneka cabe, pengembangan buah durian, pengembangan anggrek. Sedangkan untuk bidang Penyediaan Sarana, Prasarana dan Penyuluhan berupa Rehabilitasi dan Pengembangan Infrastruktur, Alat Mesin Pertanian, Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Peningkatan kualitas penyuluh melalui peningkatan kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan.

Dari beberapa arah kebijakan Nasional Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut yang sampai sekarang program tersebut ada yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mendukung Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMD tahun 2005 - 2025 yaitu 'Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Bertumpu Pada Pembangunan Industri Berbasis Pertanian, Kelautan, Pertambangan dan Pariwisata, berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan Isu Strategis dan Kondisi Pasca Pandemi, yaitu "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi", dengan kosep yang mempertimbangkan beberapa hal-hal sebagai berikut :

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025;
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

Tujuan yang diharapkan dari rencana kerja dalam pencapaian Misi dan rencana strategis adalah meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat para petani, terpenuhinya alat mesin pertanian dan sarana produksi berupa benih/bibit yang berkualitas dengan didukung sumber pembiayaan yang sangat memadai dalam mengembangkan komoditi sektor pertanian di Kabupaten Tanah Laut.

Sasaran yang diharapkan dari rencana kerja adanya peningkatan produksi secara berkelanjutan dari komoditi unggulan daerah Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian target indikator kinerja sesuai rencana strategis daerah Kabupaten Tanah dalam pencapaian Misi ke dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target Renstra Perangkat Daerah Hasil Desk Renstra dapat dilihat pada table TC. 25 dibawah ini

**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Tanah Laut 2024-2026**

I

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Realisasi 2022	Realisasi 2023 (Ton)	2024 (Ton)	2025 (Ton)	2026 (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		NILAI SAKIB KABUPATEN	B	69,00	70,01	75,00	80,01
		Meningkatnya Kinerja tata Kelola Distanhorbun yang Akuntabel	NILAI SAKIB DISTANHORBUN	BB	A	82,00	83,00	85,00
2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan					
		Meningkatnya produksi hasil pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan)	Produksi Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan					
			1. Padi	143.962	147.410,08	144.300	144.550	144.850
			2. Jagung	122.835	123.060	123.136	123.305	123.495
			3. Cabe	2.350,90	2.788,33	2.370,10	2.380,90	2.392,80
			4. Bawang Merah	11,00	111,48	11,23	11,36	11,51
			5. Karet	14.601,70	19.699,90	15.182,30	15.486,10	15.800,20
			6. Kelapa sawit	50.865,70	73.299,70	52.920,21	54.437,37	58.109,80

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **4.1 Program dan Kegiatan**

#### **a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan**

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan Isu Strategis dan Kondisi Pasca Pandemi, yaitu "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun kedepan telah berupaya untuk mendukung pencapaian pembangunan pertanian yang termasuk ke dalam aspek pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, yang merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan akan tetap berupaya semaksimal mungkin meningkatkan produksi pertanian dalam pencapaian target rencana strategis untuk 3 tahun kedepan diharapkan adanya kenaikan peningkatan produksi selalu meningkat dari tahun ketahun yang didukung dengan sumber pendanaan yang optimal melalui program dan kegiatan sumber anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Tanah Laut. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam rangka mendukung pengembangan pertanian di Indonesia dengan mengoptimalkan lahan pertanian yang ada untuk berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung kedaulatan pangan di Indonesia. Sektor pertanian pada saat ini telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Tanah Laut. Secara langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi disektor pertanian, pemerataan sumber daya manusia petani dan penyuluh dan tenaga pembantu-pembantu lainnya akan sangat diperlukan di daerah-daerah tersebut yang secara langsung dengan didukung pendanaan daerah dan program dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan menambah percepatan pengembangan pertanian di Daerah. Hal ini akan berdampak pula pada peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga petani serta mengurangi tingkat pengangguran di daerah.

**b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Recana Kerja Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 guna mencapai sasaran kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut terhadap pencapaian program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

**c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.**

Program dan kegiatan untuk tahun 2025 telah disederhanakan/disesuaikan dengan rancangan awal RKPD, terkait dengan ketersediaan pagu indikatif dan penyederhanaan program yang lebih spesifik terarah yang terakumulasi dari beberapa item-item kegiatan kedalam rumusan beberapa program dan kegiatan sehingga outcome nantinya terkoneksi dengan jelas terhadap Rancangan Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk 3 tahun kedepan. dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2 dibawah ini.

**Tabel 4.1 RUMUSAN RENCANA**

**Program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

**Kabupaten Tanah Laut**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				60.573.136.563				68.642.000.000
X.XX. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM Sekretariat Dintanhorbun	90 Nilai	26.031.964.210			90 Nilai	40.190.000.000
X.XX.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.094.112			100%	40.000.000

X.XX.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7.998.360	PAD		7 dokumen	20,000,000
X.XX.01.201.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	7.095.751,59	PAD		4 laporan	20,000,000
<b>X.XX.01.202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>22.404.680.186</b>	PAD		<b>100%</b>	<b>23.020.000.000</b>
X.XX.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	Tanah laut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 orang/bulan	22.396.681.826	PAD		136 orang/bulan	23.000.000.000
X.XX.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tanah laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dokumen	7.998.360	PAD		2 dokumen	20,000,000
<b>X.XX.01.205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	PAD		<b>100%</b>	<b>1.126.000.000</b>
X.XX.01.205.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	PAD		1 Paket	126.000.000
X.XX.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah laut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	10 orang	50.000.000	PAD		200 orang	1.000.000.000

			Pelatihan						
<b>X.XX.01.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>760.819.272</b>	PAD		<b>100%</b>	<b>1.639.000.000</b>
X.XX.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.995.968	PAD		1 Paket	30,000,000
X.XX.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah laut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	276.579.190	PAD		2 Paket	500.000.000
X.XX.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanah laut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	19.997.813	PAD		1 paket	30,000,000
X.XX.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah laut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.851.667	PAD		2 Paket	50,000,000
X.XX.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanah laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.960.000	PAD		1 dokumen	4,000,000

X.XX.01.206.07	Penyediaan Bahan / Material	Tanah laut	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	17.999.634	PAD		4 Paket	25,000,000
X.XX.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	380.435.000	PAD		24 laporan	1,000,000,000
<b>X.XX.01.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>508.004.499</b>	PAD		<b>100%</b>	<b>11.542.000.000</b>
X.XX.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	384.060.000	PAD		1 unit	500.000.000
X.XX.01.207.05	Pengadaan Mebel	Tanah laut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 unit	113.954.499	PAD		195 unit	512.000.000
X.XX.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah laut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	9.990.000	PAD		11 unit	500.000.000
X.XX.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	PAD		1 unit	10.000.000.000

<b>X.XX.01.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.650.000.000</b>	PAD		<b>100%</b>	<b>2.001.000.000</b>
X.XX.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanah laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.650.000	PAD		2 laporan	1.000.000
X.XX.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	286.000.000	PAD		12 laporan	500.000.000
X.XX.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.368.009.652	PAD		12 laporan	1.500.000.000
<b>X.XX.01.209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>637.706.490,03</b>	PAD		<b>100%</b>	<b>822.000.000</b>
X.XX.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanah laut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	31.000.000	PAD		1 unit	72.000.000

X.XX.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	98 unit	378.000.000	PAD		22 unit	600.000.000
X.XX.01.209.06	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Tanah laut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 unit	39.860.000	PAD		25 unit	50.000.000
X.XX.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	188.846.490,03	PAD		2 unit	100.000.000
X.XX.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	PAD		4 unit	0
<b>X.XX. 02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		<b>Persentase Pemenuhan sarana pertanian</b>	<b>20%</b>	<b>7.766.363.011,94</b>	PAD		<b>15%</b>	<b>4.052.000.000</b>
<b>X.XX. 02.201</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Tanah laut	<b>Persentase capaian pengawasan penggunaan sarana pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>7.569.968.114,26</b>	PAD		<b>100%</b>	<b>3.452.000.000</b>

X.XX. 02.201.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tanah laut	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	632.641.551,76	PAD		1 Laporan	1.452.000.000
X.XX. 02.201.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Tanah laut	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	6.937.326.562,50	PAD		1 Laporan	2.000.000.000
X.XX. 02.202	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Tanah laut	<b>Persentase capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	100%	<b>196.394.897,68</b>	PAD		<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>
X.XX. 02.202.01	Penjamin Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Tanah laut	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	78.615.794,00	PAD		1 VUB	300.000.000
X.XX. 02.202.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Tanah laut	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	117.779.103,68	PAD		1 dokumen	300.000.000
X.XX. 03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN</b>		<b>Persentase pemenuhan prasarana pertanian</b>	<b>35 % 10 % 40 %</b>	<b>21.812.822.640,41</b>	PAD		<b>45%</b>	<b>18.200.000.000</b>

	<b>PRASARANA PERTANIAN</b>		<b>tanaman pangan dan Hortikultura Persentase pemenuhan prasarana pertanian tanaman perkebunan Persentase pemenuhan prasarana pertanian</b>						
<b>X.XX. 03.201</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Tanah laut</b>	<b>Persentase capaian Pengembangan prasarana pertanian</b>	<b>100%</b>	2.070.199.569,00	PAD		<b>100%</b>	<b>6.600.000.000</b>
X.XX. 03.201.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Tanah laut	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B yang dikelola	2 dokumen	2.057.289.569,00	PAD		1 dokumen	6.000.000.000
X.XX. 03.201.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tanah laut	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 dokumen	12.910.000,00	PAD		1 dokumen	600.000.000

<b>X.XX. 03.202</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Tanah laut	<b>Persentase capaian pembangunan prasarana pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>19.742.623.071,41</b>	PAD	-	<b>100%</b>	<b>11.600.000.000</b>
X.XX. 03.202.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tanah laut	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 unit	635.133.776,00	PAD		3 unit	1.000.000.000
X.XX. 03.202.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Tanah laut	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	1.051.365.324,60	PAD		3 unit	600.000.000
X.XX. 03.202.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tanah laut	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	98 unit	18.056.123.970,81	PAD		50 unit	10.000.000.000
<b>X.XX. 05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		<b>Persentase Luas Area Terdampak OPT dan DPI Yang Tertangani Pada Tanaman Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>848.372.553,54</b>	PAD		<b>100%</b>	<b>3.000.000.000</b>

<b>X.XX. 05.201</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Tanah laut</b>	<b>Persentase capaian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>848.372.553,54</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>3.000.000.000</b>
X.XX. 05.201.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tanah laut	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	60 Ha	470.498.756,54	PAD		60 Ha	1.000.000.000
X.XX. 05.201.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tanah laut	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1.000 Ha	377.873.797,00	PAD		1000 Ha	2.000.000.000
<b>X.XX. 06</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		<b>Persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>2.851.608.949,30</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>2.000.000.000</b>

X.XX. 06.201	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tanah laut	<b>Persentase capaian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	2.851.608.949,30	PAD		100%	2.000.000.000
X.XX. 05.201.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Tanah laut	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 dokumen	2.851.608.949,30	PAD		1 dokumen	2.000.000.000
X.XX. 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		<b>Luas Perkebunan Sawit Rakyat yang Terdaftar Persentase Penyuluh Pertanian Yang Terlatih</b>	2000 ha 16,2 %	1.262.005.197	PAD		16,2%	1.200.000.000
X.XX. 07.201	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Tanah laut	<b>Persentase Capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</b>	100%	1.262.005.197	PAD		100%	1.200.000.000
X.XX. 07.201.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Tanah laut	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 unit	962.005.197,00	PAD		11 unit	600.000.000
X.XX. 07.201.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan	Tanah laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan	3 unit	0	PAD		3 unit	600.000.000

	Prasarana Penyuluhan Pertanian		Pertanian						
X.XX. 07.201.09	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tanah laut	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 dokumen	300.000.000	PAD		0	0

Tabel 4.2  
Usulan Pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten

No	Pekerjaan	Lokasi	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Kelompok Tani Suka Karya Desa Sebamban Baru Kec.Kintap	1 Unit	200,000,000	APBN	
2	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Kelompok Tani Karya Maju Desa Benua Tengah Kec.Takisung	1 Unit	200,000,000	APBN	
3	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Kelompok Tani Sri Mulyo Desa Bluru Kec.Batu Ampar	1 Unit	200,000,000	APBN	
4	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Bumi Jaya Kec.Takisung	1 Unit	200,000,000	APBN	
5	Pengembangan Bawang Merah	Kab. Tanah Laut	25 Ha	900,000,000	APBN & APBD	

					I Provinsi	
6	Pengembangan Aneka Cabai	Kab. Tanah Laut	45 Ha	585,000,000	APBN & APBD I Provinsi	
7	Pengembangan Durian	Kab. Tanah Laut	15 Ha	480,000,000	APBD I Provinsi	
8	Pengembangan Jeruk	Kab. Tanah Laut	10 Ha	350,000,000	APBD I Provinsi	
9	Pengembangan Tanaman Obat	Kab. Tanah Laut	15 Ha	90,000,000	APBN & APBD I Provinsi	
10	Hibah Alat Sarana Pengolahan Cabe	Kab. Tanah Laut	2 Paket	45,000,000	APBD Provinsi	
11	Sarana Pasca Panen	Kab. Tanah Laut	1 Paket	132,000,000	APBN	
12	Sarana Pengolahan Hortikultura	Kab. Tanah Laut	1 Paket	110,000,000	APBN	
13	Prasarana Pasca Panen Hortikultura	Kab. Tanah Laut	1 Paket	255,000,000	APBN	
14	Penangkaran Bawang Merah	Kec. Kurau dan Kec. Pelaihari	2 Ha	180,000,000	APBD Provinsi	
15	Jalan Pertanian	Kab. Tanah Laut	2 Unit	400,000,000	APBD I Provinsi	
16	Embung Pertanian	Kab. Tanah Laut	2 Unit	240,000,000	APBN	
17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kab. Tanah Laut	2 Unit	150,000,000	APBN	
18	Jalan Pertanian	Kab. Tanah Laut	2 Unit	400,000,000	DAK	
19	Jalan Pertanian	Kab. Tanah Laut	1 Unit	200,000,000	APBD Provinsi	
20	Rintisan dan Penerbitan STD-B	Pekebun Sawit di Kec. Pelaihari	300 persil STD-B	150,600,000	APBN	Sosialisasi, pendataan, verifikasi dan Pemetaan serta

						Penerbitan STD-B
21	Bantuan Pembekul lateks	Pekebun Karet di Kab. Tanah Laut	1200 hektar	279,600,000	APBN	Keltani/Gapoktan/U PPB
22	Intensifikasi Karet	Pekebun Karet di Kab. Tanah Laut	500 hektar	900,000,000	APBN	Kel tani/Gapoktan/UPP B
23	Peremajaan Karet	Pekebun Karet di Kab. Tanah Laut	150 hektar	1,950,000,000	APBN	Kel tani/Gapoktan/UPP B
24	Gudang Penyimpanan Bokar	UPPB di Kec. Takisung	2 unit	350,000,000	APBN	UPPB Kec. Takisung
25	Pelatihan SDM Pekebun Kelapa Sawit	Pekebun sawit di Kab. Tanah Laut	120 org pekebun	120,000,000	BPDP-KS	prioritas peserta pelaksana PSR
26	Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR)	Kel.tani Abadi, Kel.tani Bina Tani, Kel. Tani Bumi Tani	500 hektar	15,750,000,000	BPDP-KS	Kec. Bati-Bati, Kec. Kintap dan Kec. Bajuin
27	- Corn Sheller Mobile	Kab. Tanah Laut	5 unit	316,780,000	APBN	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
28	- Power Trehreser	Kab. Tanah Laut	22 unit	539,000,000	APBN	
29	-Power Thresher Multiguna Mobile	Kab. Tanah Laut	4 unit	265,000,000	APBN	
30	- Huskher dan Polisher	Kab. Tanah Laut	1 unit	100,000,000	APBN	
31	- Dryer Ultra violet (UV)	Kab. Tanah Laut	2 unit	700,000,000	APBN	

32	- Combine Harvester besar	Kab. Tanah Laut	4 unit	1,800,000,000	APBN	
33	- Sarana UPH tanaman Pangan	Kab. Tanah Laut	1 unit	75,000,000	APBN	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
34	- bangunan UPH tanaman Pangan	Kab. Tanah Laut	1 unit	75,000,000	APBN	
35	- RMU	Kab. Tanah Laut	1 unit	250,000,000	APBN	
36	Bantuan Benih Padi (40 kg/ha)	Kab. Tanah Laut	1000 ha	700,000,000	APBN	kawasan Padi Penyaluran Sarana Produksi Budidaya Padi Lahan Kering (1000 ha)
37	Bantuan NPK Non Subsidi (100 kg/ha)	Kab. Tanah Laut	1000 ha	1,100,000,000	APBN	
38	Bantuan Pestisida (1 Pkt/ha) Provinsi	Kab. Tanah Laut	1000 ha	200,000,000	APBN	
39	Bantuan Benih Padi (25 kg/ha)	Kab. Tanah Laut	3000 ha	1,312,500,000	APBN	Penyaluran Sarana Produksi Budidaya Padi Rawa (3000 ha)
40	Bantuan NPK Non Subsidi (100 kg/ha)	Kab. Tanah Laut	3000 ha	3,300,000,000	APBN	
41	Bantuan Pupuk Hayati (1 Pkt/ha)	Kab. Tanah Laut	3000 ha	600,000,000	APBN	
42	Bantuan Pestisida (1 Pkt/ha)	Kab. Tanah Laut	3000 ha	600,000,000	APBN	

43	- Bantuan Benih Padi Inbrida [3000 HA x 25 KG]	Kab. Tanah Laut	75000 kg	1,312,500,000	APBN	Area penyaluran benih padi
44	- Bantuan Benih Padi Hibrida [500 HA x 35 KG]	Kab. Tanah Laut	17500 kg	2,187,500,000	APBN	
45	- Bantuan Benih jagung [3000 HA x 15 KG]	Kab. Tanah Laut	45000 kg	6,750,000,000	APBN	Area penyaluran benih jagung
46	- Power Trehreser	Kab. Tanah Laut	11 unit	269,500,000	APBN	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
47	-Power Thresher Multiguna Mobile	Kab. Tanah Laut	2 unit	132,500,000	APBN	
48	- Combine Harvester besar	Kab. Tanah Laut	1 unit	450,000,000	APBN	
49	- RMU	Kab. Tanah Laut	1 unit	250,000,000	APBN	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
50	Bantuan Benih Padi (25 kg/ha)	Kab. Tanah Laut	500 ha	218,750,000	APBN	Pengembangan Padi Inbrida
51	Bantuan NPK Non Subsidi (100 kg/ha)	Kab. Tanah Laut	500 ha	550,000,000	APBN	
52	Bantuan Pupuk Hayati (1 Pkt/ha)	Kab. Tanah Laut	500 ha	100,000,000	APBN	
53	Bantuan Benih Padi (20 kg/ha)	Kab. Tanah Laut	200 ha	87,500,000	APBN	Pengembangan Padi Lokal
54	Bantuan NPK Non Subsidi (100 kg/ha)	Kab. Tanah Laut	200 ha	220,000,000	APBN	
55	Bantuan Pupuk Hayati (1 Pkt/ha)	Kab. Tanah Laut	200 ha	40,000,000	APBN	
56	Bantuan Benih Padi (15 kg/ha)	Kab. Tanah Laut	200 ha	300,000,000	APBN	Pengembangan Jagung Hibrida

57	Bantuan NPK Non Subsidi (100 kg/ha	Kab. Tanah Laut	200 ha	220,000,000	APBN	
58	Bantuan Pupuk Hayati (1 Pkt/ha)	Kab. Tanah Laut	200 ha	40,000,000	APBN	
59	Bantuan Benih Padi (25 kg/ha)	Kab. Tanah Laut	150 ha	65,625,000	APBN	Penangkaran Benih Padi Inbrida
60	Bantuan NPK Non Subsidi (100 kg/ha )	Kab. Tanah Laut	150 ha	165,000,000	APBN	
61	Bantuan Benih Kacang Tanah (110 kg/ha)	Kab. Tanah Laut	100 ha	165,000,000	APBN	Pengembangan Kacang Tanah
62	Bantuan NPK Non Subsidi (100 kg/ha	Kab. Tanah Laut	100 ha	110,000,000	APBN	
63	Bantuan Benih Jagung (20 kg/ha)	Kab. Tanah Laut	3000 ha	9,000,000,000	APBN	Penyaluran Sarana Produksi Jagung (3000 ha)
64	Bantuan NPK Non Subsidi (100 kg/ha	Kab. Tanah Laut	3000 ha	3,300,000,000	APBN	
65	Bantuan Pupuk Hayati (1 Pkt/ha)	Kab. Tanah Laut	3000 ha	600,000,000	APBN	
66	Bantuan Pestisida (1 Pkt/ha)	Kab. Tanah Laut	3000 ha	600,000,000	APBN	
67	BOP Penyuluh Pertanian	Kab. Tanah Laut	95 orang	5,016,000,000	ABPN	Kab. Tanah Laut
68	Penumbuhan & Pengembangan KEP	Kab. Tanah Laut	1 KEP	16,500,000	APBD I	Ds. Gunung Makmur - Takisung
69	Sekolah Lapangan	Kab. Tanah Laut	1 Kelompok Tani	54,905,350	APBD I	Ds. Batu Mulya - Panyipatan
70	Demplot wilayah binaan BPP	Kab. Tanah Laut	1 BPP	39,907,517	APBD I	BPP Kec. Pelaihari
71	Pelaksana Kaji Terap	Kab. Tanah Laut	1 Penyuluh Pertanian	14,706,900	APBD I	Kelurahan Pelaihari - Pelaihari

			(PNS)			
72	Prakti Penyuluh Pertanian Swadaya	Kab. Tanah Laut	1 Penyuluh Pertanian (Swadaya)	14,706,900	APBD I	Ds. Gunung Melati-Batu Ampar
73	Sosialisasi AOTP	Kab. Tanah Laut	1 kali	7,500,000	APBD I	Kab. Tanah Laut

## **BAB. V PENUTUP**

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 secara finansial, untuk rencana kerja tersebut yaitu dalam hal pencapaian target dan indikator kinerja SKPD tentu akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan anggaran baik dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian RI .

Arah dan kebijakan SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berupaya untuk meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun diharapkan adanya peningkatan produksi pertanian berupa padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabe, sawit dan karet yang merupakan komoditi unggulan daerah yang perlu untuk dikembangkan secara terus menerus dengan harapan Kabupaten Tanah Laut akan menjadi sentral produksi padi dan jagung hal ini ditunjang dengan adanya 2 (dua) buah pabrik pakan ternak di Kabupaten Tanah Laut .

Yang menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ketersediaan dana yang tidak memadai untuk arah kegiatan pertanian yang diperlukan dari berbagai multi dimensi. Kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian oleh karena pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis pelatihan dan lain-lain baik ditingkat teknis penyuluh pertanian maupun para petani untuk selalu menjadi perhatian penting dan lebih diintensifkan.

Sejalan dengan adanya program Nasional dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk pelaksanaan tersebut diperlukan biaya yang lebih terpusat dalam rangka mengendalikan rencana kerja, pelaksanaan dan pengawasan yang lebih intensif secara berkesinambungan.

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jalan Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. (0512) 21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari  
Email : [distanbun77@yahoo.co.id](mailto:distanbun77@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 556 / 860 /Distanhorbun/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, dan dengan terbitnya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tentang Rencana Kerja (Renja) SOPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 3 pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertical di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Nomor 13); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Tambahan Negara Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024, Tanggal 28 Juni 2024, Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada Tanggal : 08 Juli 2024

KEPALA DINAS,



Tembusan Kepada Yth :

1. Pj. Bupati Tanah Laut (Sebagai laporan)
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut
3. Inspektur Wilayah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut
5. Kepala BAPENDA Kabupaten Tanah Laut

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Nomor : 556 / 860 /Distanhorbun/2024

Tanggal : 08 Juli 2024

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2025**

NO	Nama/NIP/ Pangkat/ Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Tim
1	Ir. M.Faried Widyatmoko NIP. 19680929 199503 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Leni Sari Indrawati, A.KS NIP. 19761008 200003 2 005 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Ketua Tim
3	Supriyanto Prihatin, SP, MP NIP. 19850409 201101 1 003 Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4	Yulianti, S.Sos NIP. 19740716 200701 2 012 Penata Muda Tk.Ia (III/b)	Kasubbag Keuangan	Anggota Pokja
5	Elly Nuryanti, A.Md NIP. 19861111 201001 2 017 Penata Muda Tk.Ia (III/b)	Kasubbag Umpeg	Anggota Pokja
6	H. Muhammad Fahrizal, SP NIP. 19810310 201001 1 027 Penata (III/d)	Kabid Tanaman Pangan	Anggota Pokja
7	AL Jamaludin Malik, A.Pi NIP. 19670804 199103 1 010 Pembina (IV/a)	Kabid Hortikultura	Anggota Pokja
8	Edi Hariyadi, SP NIP. 19800512 200903 1 006 Penata TK I (III/d)	Kabid Perkebunan	Anggota Pokja
9	Sunarko, S.Pt NIP. 19700611 199303 1 005 Penata TK I (III/d)	Plt. Kabid Penyuluhan dan PSP	Anggota Pokja

KEPALA DINAS,

  
Ir. M. FARIED WIDYATMOKO  
NIP. 19680929 199503 1 006

**Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025**  
**Per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Per Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ ( Berkurang )
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.0.00.0.00.04.0000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN			52,488,388,124.57	60,573,136,562.58	8,084,748,438.01
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26,262,384,415.45	26,031,964,210.39	-230,420,205.06
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16,999,105.22	15,094,111.89	-1,904,993.33
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Per encanaan Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	9,999,548.22	7,998,360.30	-2,001,187.92
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6,999,557.00	7,095,751.59	96,194.59
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22,406,681,374.00	22,404,680,185.90	-2,001,188.10
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/bulan	22,396,681,826.00	22,396,681,826.00	-
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	9,999,548.00	7,998,359.90	-2,001,188.10
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50,000,000.00	50,000,000.00	-
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	-
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00	-
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			958,499,295.20	760,819,271.57	-197,680,023.63
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21,995,968.00	21,995,968.00	-
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	371,033,727.20	276,579,189.64	-94,454,537.56
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,997,813.00	19,997,813.00	-
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	34,963,787.00	39,851,666.90	4,887,879.90
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,960,000.00	3,960,000.00	-
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	17,999,634.03	2,999,634.03
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	491,548,000.00	380,435,000.00	-111,113,000.00

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ ( Berkurang )
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.0.00.0.00.04.0000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN			52,488,388,124.57	60,573,136,562.58	8,084,748,438.01
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26,262,384,415.45	26,031,964,210.39	-230,420,205.06
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			620,558,499.00	508,004,499.00	-112,554,000.00
3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	513,597,000.00	384,060,000.00	-129,537,000.00
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54 Unit	96,971,499.00	113,954,499.00	16,983,000.00
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9,990,000.00	9,990,000.00	-
3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	-	-
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,647,159,652.00	1,655,659,652.00	8,500,000.00
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,650,000.00	1,650,000.00	-
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	277,500,000.00	286,000,000.00	8,500,000.00
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,368,009,652.00	1,368,009,652.00	-
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			562,486,490.03	637,706,490.03	75,220,000.00
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	31,000,000.00	31,000,000.00	-
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	98 Unit	316,000,000.00	378,000,000.00	62,000,000.00
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	26,640,000.00	39,860,000.00	13,220,000.00
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	188,846,490.03	188,846,490.03	-
3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan					
	Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	-	-

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ ( Berkurang )
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.0.00.0.00.04.0000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN			52,488,388,124.57	60,573,136,562.58	8,084,748,438.01
3:27:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26,262,384,415.45	26,031,964,210.39	-230,420,205.06
3:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			3,485,211,148.00	7,766,363,011.94	4,281,151,863.94
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			3,326,370,100.00	7,569,968,114.26	4,243,598,014.26
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	716,449,896.00	632,641,551.76	-83,808,344.24
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	2,609,920,204.00	6,937,326,562.50	4,327,406,358.50
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			158,841,048.00	196,394,897.68	37,553,849.68
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	96,015,478.00	117,779,103.68	21,763,625.68
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman					
		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	62,825,570.00	78,615,794.00	15,790,224.00
3:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			18,500,593,001.00	21,812,822,640.41	3,312,229,639.41
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			2,290,796,179.00	2,070,199,569.00	-220,596,610.00
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di					
	Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	2 Dokumen	2,172,391,179.00	2,057,289,569.00	-115,101,610.00
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan , Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota					
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	118,405,000.00	12,910,000.00	-105,495,000.00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			16,209,796,822.00	19,742,623,071.41	3,532,826,249.41
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian					
		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	643,533,776.00	635,133,776.00	-8,400,000.00
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	35 Unit	14,910,027,721.00	18,056,123,970.81	3,146,096,249.81
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit	656,235,325.00	1,051,365,324.60	395,129,999.60

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ ( Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.0.00.0.00.04.0000	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN</b>			52,488,388,124.57	60,573,136,562.58	8,084,748,438.01
3.27.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			875,277,657.00	848,372,553.54	-26,905,103.46
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			875,277,657.00	848,372,553.54	-26,905,103.46
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	60 Ha	490,353,860.00	470,498,756.54	-19,855,103.46
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1000 Ha	384,923,797.00	377,873,797.00	-7,050,000.00
3.27.06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>			2,466,447,593.00	2,851,608,949.30	385,161,356.30
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2,466,447,593.00	2,851,608,949.30	385,161,356.30
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian					
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	2,466,447,593.00	2,851,608,949.30	385,161,356.30
3.27.07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			898,474,310.12	1,262,005,197.00	363,530,886.88
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			898,474,310.12	1,262,005,197.00	363,530,886.88
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Unit	497,494,511.00	962,005,197.00	464,510,686.00
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	100,979,799.12	-	-100,979,799.12
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian					
		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	300,000,000.00	300,000,000.00	-